

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan cita-cita nasional. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana nawacita program pemerintahan Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan kata lain percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maju atau tidaknya Negara Republik Indonesia tergantung maju atau tidaknya desa dan masyarakat desa, untuk itu pemerintah pusat dan provinsi menyamakan persepsi bahwa menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Sedemikian pentingnya desa dalam percepatan pembangunan oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tujuan hendak mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. (Desa)

Penelitian ini menganalisis Gerakan Desa Membangun (GDM) yang muncul sebagai gerakan kolektif masyarakat desa di wilayah Banyumas untuk menginisiasi kemandirian desa dengan mengusung pendekatan “desa membangun” sebagai antitesis dari pendekatan “membangun desa” oleh pemerintah. Gerakan ini ingin mewujudkan desa menjadi subyek pembangunan agar lebih mandiri dan bermartabat sehingga memiliki posisi tawar serta

menghilangkan stigma desa sebagai segala sesuatu yang tidak menyenangkan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Menjadi menarik kemudian untuk menyusun kajian ilmiah untuk menghasilkan analisis rinci sejauh mana GDM dengan pendekatan desa membangun mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menjadi pelaku-pelaku pembangunan. Apalagi dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa pada posisi strategis sangat membutuhkan perhatian semua kalangan dalam rangka mengawal implementasinya, termasuk dari penulis sebagai bagian dari civitas akademik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan sesuai dengan karakter objek penelitian yaitu GDM sebagai sebuah gerakan kolektif masyarakat desa, penulis memilih studi kasus sebagai metode untuk membedah fenomena ini. Pemilihan metode ini berdasarkan kemampuannya dalam menangkap fenomena empirik, kontemporer, dan kesempatan penggalan bukti-bukti dari berbagai sumber (Yin, 2004).

Gerakan Desa Membangun (GDM) teretus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas pada acara Lokakarya Desa Membangun (LDM) yang diadakan oleh Pemerintah Desa Melung dengan mengundang Pemerintah Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya dan desa-desa tetangga di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagai kawan diskusi. (:\\desamembangun.or.id.)

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat secara keseluruhan dari GDM, baik dari aspek kesejarahan (*history*), aspek konsolidasi internal dan eksternal

serta aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari GDM di dalam menginisiasi pengembangan kemandirian desa.

Untuk lebih menajamkan analisis maka dipilih lokasi penelitian Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Bayumas yang merupakan salah satu penggagas GDM dan sampai sekarang aktif dan terus menunjukkan geliatnya sebagai desa yang mengembangkan diri untuk menjadi subyek pembangunan.

Sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up), GDM lahir sebagai bentuk inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian desa. GDM dicetuskan sebagai antitesis dari program-program membangun desa oleh pemerintah yang lebih merujuk pada pengembangan perdesaan sebagai suatu kawasan. Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini lebih kepada pengembangan kawasan perdesaan dan disesuaikan dengan sudut pandang pemerintah sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan desa menjadi obyeknya. (:\\desamembangun.or.id.)

Desa merupakan sosok pemerintahan lokal yang memiliki beragam identitas. Berbagai unsur kehidupan berawal dari desa yang keberadaannya sudah ada dari sebelum bangsa ini merdeka. Desa sebagai salah satu bagian suatu negara memiliki karakteristik yang sama sebagai salah satu lingkungan politik,

sosial, ekonomi dan budaya. Keadaan ini secara nyata memberikan pengaruh besar tata kehidupan desa terutama dalam menciptakan stabilitas diberbagai bidang.

Dinamika struktural ini memberikan bukti bahwa aktifitas sistem pengelolaan tata pemerintah desa memiliki kompleksitas penting. Desa sebagai struktural terkecil sekaligus ujung tombak pemerintahan negara. Desa memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam menghadapi isu dan gejolak sosial yang timbul. (Koentjaraningrat, 1970 , p. 28)

Desa menjadi bagian tema penting dalam membahas soal demokrasi lokal. Sejak reformasi politik berlangsung di Indonesia, inisiatif untuk melakukan pembaruan desa terus bermunculan. Arahnya adalah mendorong agar praktik demokratisasi dilangsungkan, serta menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Pesan mulia itu memang tidak mudah diwujudkan, dimana tarik menarik kepentingan elit politik dan ekonomi selalu saja mewarnai bahkan menghadang perjuangan komunitas warga pinggiran ini didalam mewujudkan cita-citanya mempengaruhi arus perubahan. (Sujito, Arie, 2013)

Harapan awal untuk membenahi desa muncul sejak reformasi politik tahun 1998 digelorkan. Terbitnya UU No. 22/tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengintrodusir otonomi desa, serta UU No. 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan daerah, telah memberikan ruang kebebasan bagi daerah dan desa untuk secara otonom mengatur pemerintahannya sendiri. Regulasi itu memantik tumbuhnya perhatian lokalitas desa. Munculnya aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta tuntutan

akuntabilitas pejabat publik, yang dilakukan secara sporadis maupun kolektif menjadi landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa tersebut makin semarak. (Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2003)

Hal yang terjadi kemudian adalah adanya beberapa pergeseran signifikan; pertama, berkurangnya dominasi birokrasi, digantikan oleh peran institusi-institusi masyarakat lokal, seperti adat misalnya. Makin tumbuh keberadaan forum-forum kewargaan di desa sebagai bagian dari social capital yang didalamnya berkembang nilai-nilai partisipasi secara otentik. (Menggunakan pemikiran Bardhan (1995) m. s.) Kedua, semangat adaptasi atas demokrasi delegatif-liberatif cukup besar yang termaktub melalui regulasi baru ini. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD atau Baperdes), yang bertindak sebagai badan legislatif baru di desa sangat bermakna menjadi institusi demokrasi. Ketiga, adalah semangat partisipasi masyarakat sangat dikedepankan.

Proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi terbangun dalam bingkai kebijakan pemerintah pusat secara komando (top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat (bottom-up). (Menggunakan pemikiran Bardhan (1995) m. s.)

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didukung oleh dorongan keterbukaan informasi publik semakin menguatkan pendekatan baru sebagai antithesis dari pendekatan program pembangunan pemerintah. Saat ini sedang marak dibicarakan adanya konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak

dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*).

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. (Eko, *Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*, 2014, p. 34)

Pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang.

Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa. (Eko, *Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa* , 2003, pp. 35-36)

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Ada perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat state centric: otokratis, top down, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya. (Eko, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, p. 37)

Dalam kontek pemberdayaan, strategi membangun desa yang menempatkan desa sebagai obyek bak sebuah serangan bertubi-tubi selama lebih dari empat puluh tahun terakhir.

Pada masa orde baru, jelas-jelas pemerintah ingin mengatur dan mengawasi desa untuk kepanjangan kekuasaan. UU No. 5/1979 sebagai senjata efektif untuk mematikan desa dan kenyataannya pada era reformasi ternyata belum banyak berubah. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 memang berupaya memberi ruang bagi desa, tetapi masih ada program pemberdayaan nasional yang mematikan implementasi UU tersebut untuk desa. Daerah pun masih setengah hati memberikan hak-hak desa dan hanya menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan. Dengan dalih membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun

daerah menerapkan program pemberdayaan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Namun yang terjadi kemudian adalah alih alih masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, yang didapatkan justru ketergantungan yang semakin tinggi. (Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, p. iv)

Tujuan yang ingin dicapai dari Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah membangkitkan kesadaran bahwa untuk mewujudkan kemajuan desa, masyarakat desa tidak selayaknya hanya menunggu belas kasihan orang lain atau pihak lain dari luar desa saja. Tetapi masyarakat desa sendirilah yang harus bergerak untuk mengubah desanya agar menjadi lebih baik. Mental kemandirian muncul dibangun dengan pengertian bahwa desa bukan berarti tidak butuh orang atau pihak lain, namun agar desa maju, desa harus menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Kerangka hubungan antara desa dengan pihak lain sebagai kerangka hubungan yang sejajar atau sederajat sehingga desa pun akan menjadi lebih bermartabat.

Dengan memperkuat desa sebetulnya pada ujungnya juga akan memperkuat negara. Di sinilah kita menemukan makna peran dari Gerakan Desa Membangun, sehingga tidak berlebihan kiranya jika dikatakan Gerakan Desa Membangun menjadi wujud kongkrit dari upaya penguatan masyarakat sipil (civil society).

Sejak digagas pada akhir tahun 2011 lalu, GDM terus mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama desa-desa di banyak wilayah di Indonesia

yang tergerak untuk mengembangkan kemandirian desa dalam pembangunan. Dari tahun ke tahun, jumlah desa yang tergabung dalam GDM ini terus meningkat hingga sampai pertengahan tahun 2014 ini mencapai lebih dari 1060-an desa yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di luar desa, seperti Kementerian Kominfo, Pemerintah Daerah, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), jaringan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (R-TIK) Indonesia, fasilitator PNPM Mandiri di berbagai wilayah, LSM, akademisi, berbagai komunitas masyarakat.

Berbagai prestasi membanggakan pun mulai ditorehkan oleh desa-desa maupun para pegiat desa dalam jejaring GDM. Tekad kuat untuk menunjukkan bahwa masyarakat desa mampu, mandiri dan berdaya menjadi pelaku pembangunan mendorong desa terus berinovasi baik dalam pengelolaan tata pemerintahan desa, pengelolaan potensi dan sumber daya desa, maupun mewujudkan kemandirian teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh GDM mampu memunculkan desa-desa unggul yang berprestasi membangun desa. Di wilayah Jawa Barat misalnya, Irman Meilandi, warga Desa Mandalamekar, Kab. Tasikmalaya sekaligus pegiat GDM mendapat penghargaan “2011 Seacology Prize” atas usahanya dalam melestarikan hutan lindung di desanya. Penghargaan tersebut diberikan kepadanya di David Brower Center, Berkeley, California, AS. ([:\desamembangun.or.id](http://desamembangun.or.id))

Keberhasilan desa-desa dalam jejaring Gerakan Desa Membangun

lainnya ditunjukkan misalnya di wilayah Kabupaten Banyumas, dimana Desa Melung memperoleh penghargaan SCTV Awards 2014 atas nama Agung Budi Satrio, Mantan Kepala Desa Melung untuk kategori pemberdayaan masyarakat, serta Desa Dermaji memperoleh penghargaan “Inspiring Young Leader” Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Beritasatu.com. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Terpilih Joko Widodo pada tanggal 23 Agustus 2014 di Jakarta atas nama Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji sekaligus pegiat GDM. (<http://dermaji.desa.id>)

Alasan pemilihan Desa Melung menjadi lokasi studi kasus bagaimana GDM menginisiasi kemandirian desa tidak terlepas dari keberadaan Desa Melung sebagai salah satu desa penggagas berdirinya GDM. Pada awalnya, desa ini merupakan salah satu desa yang cukup terisolir di wilayah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, bahkan merupakan desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) dimasa lalu yang statusnya tidak pernah ada pencabutan sampai saat ini.

Keterisolasian tidak menjadi alasan Desa Melung untuk mengajak rekan-rekan Perangkat Desa Melung pada tahun 2009 untuk terbuka terhadap informasi dan pengetahuan dari perkembangan dunia saat ini. Desa Melung mengajak SD dan SMP setempat untuk bekerja sama membangun jaringan wifi internet yang dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh warga desa. Sejak tahun 2011 para perangkat Desa Melung bergerak dan bekerja dengan kesungguhan hati untuk melepaskan diri dari identitas desa yang tertinggal melalui kegiatan Lokakarya Desa Membangun (LDM) yang akhirnya melahirkan Gerakan Desa Membangun

(GDM).

Melalui GDM, Desa Melung terus meningkatkan peran desa dalam mempergunakan internet sebagai bagian untuk pengarusutamaan isu tentang desa, dimana selama ini berita tentang desa di media arus utama masih sangat sedikit. Disamping itu pemanfaatan internet lainnya serta penggunaan aplikasi mitra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki data yang akurat dan up to date, diantaranya sebagai bagian dari upaya mengangkat potensi desa dan mencatat kegiatan desa yang suatu saat menjadi sejarah tentang perkembangan di sebuah desa. Selain itu, hal penting lainnya adalah bagaimana menjalankan dan melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terus dituntut masyarakat agar kerja pemerintah desa terpantau dan akuntabel.

Sehingga pilihan logis yang dapat dilakukan GDM sebagai langkah awal adalah membuat desa bersuara. Sejarah yang ditorehkan GDM yang masih dan terus berjalan ini kemudian berlanjut membawa konsep awal ini menuju daerah ratusan kilometer dari desa penggagas, yaitu Desa Melung. Konsep ini diterima baik di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya, mungkin karena tipikal karakter masyarakat Banyumas yang cablaka (apa adanya), terbuka dan egaliter, ide desa bersuara ini tersebar dan berkembang subur menjadi sebuah gerakan desa untuk mampu membangun dirinya sendiri. Kondisi ini semakin mendapat dukungan dikarenakan banyaknya komunitas dan “penabuh gendang” di Banyumas seperti Komunitas Blogger Banyumas, Komunitas BlankOn Banyumas dan lainnya, gerakan ini perlahan tapi pasti semakin kencang tersuarakan. (:\\desamembangun.or.id.)

Sejak menggagas dan bergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM) ini, telah banyak kemajuan yang dialami Desa Melung. Desa ini ternyata sudah mempergunakan internet untuk menggali potensi warga, seperti pertanian, peternakan, dan seni budaya. Selain itu, teknologi internet dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi dan pemerintahan, seperti data penduduk, memperpanjang KTP, surat menyurat, dan pengelolaan sumber daya warga. Dampaknya, tata kelola pemerintahan makin efektif dan tepat waktu. Perubahan dari desa terisolir yang warganya saja malu mengakui sebagai warga Desa Melung menjadi desa yang menjadi sorotan publik luas bahkan diakui oleh Pemerintah Pusat yang kemudian menjadikan Desa Melung sebagai salah satu dari 5 (lima) desa terpilih se-Indonesia sebagai penerima prototype community access point (CAP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk wilayah Banyumas.

Berbagai prestasi mulai ditorehkan oleh Desa Melung dan GDM, diantaranya menjadi pusat lingkaran belajar desa-desa di Indonesia dalam penerapan teknologi informasi berbasis open source, seperti yang dilakukan Dinhubkominfo Kabupaten Banjarnegara yang mengajak para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara untuk studi banding di Desa Melung dan Bappeda Kab. Pemalang melakukan hal yang sama. Desa Melung juga menjadi lokus penelitian pemberdayaan masyarakat oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti UGM, ITB, UNPAD, Universitas Trisakti, dan berturut-turut mendapat penghargaan SCTV Awards 2014 dibidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian besarnya animo masyarakat desa di Indonesia terhadap

keberhasilan GDM dan Desa Melung ini tercermin dengan semakin banyaknya anggota GDM yang sampai saat ini mencapai kurang lebih 1062 desa di seluruh Indonesia. Belum lagi dukungan berbagai pihak baik elemen masyarakat, swasta maupun pemerintah semakin mendorong perkembangan GDM.

Menjadi menarik kemudian untuk mengetahui lebih terperinci dan ilmiah bagaimana Gerakan Desa Membangun (GDM) yang digagas di Desa Melung ini dalam tahapan sejarah atau histori pendiriannya, tahapan konsolidasi untuk mengembangkan jaringan GDM dan tahapan keberlanjutannya di masa yang akan datang sebagai gerakan kolektif masyarakat dalam mengembangkan kemandirian desa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sumber daya desa dan tata kelola pemerintah desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah pokok : Bagaimana Gerakan Desa Membangun (GDM) sebagai Gerakan Kolektif Masyarakat Desa Menginisiasi Pengembangan Kemandirian Desa (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas).

Rumusan masalah pokok tersebut akan dijawab melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana proses pembentukan Gerakan Desa Membangun dalam menginisiasi pengembangan kemandirian desa di Desa Melung?

1.2.2 Bagaimana keberlanjutan (*sustainability*) Gerakan Desa Membangun di Desa Melung dalam menginisiasi pengembangan kemandirian desa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai Gerakan Desa Membangun (GDM) di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas sebagai Gerakan Kolektif Masyarakat Desa Menginisiasi Pengembangan Kemandirian Desa.

1.3.1 Mengidentifikasi proses dan sejarah pembentukan Gerakan Desa Membangun (GDM).

1.3.2 Menganalisis keberlanjutan (*sustainability*) GDM di Desa Melung dalam menginisiasi pengembangan kemandirian desa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dan menjadi referensi kajian mengenai Gerakan Desa Membangun (GDM) di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas sebagai Gerakan Kolektif Masyarakat Desa Menginisiasi Pengembangan Kemandirian Desa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pembangunan desa dalam program Gerakan Desa Membangun.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait program Gerakan Desa Membangun.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pembangunan desa dalam program Gerakan Desa Membangun.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui program Gerakan Desa Membangun

1.4.2.4 Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Pembangunan Desa

Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Untuk dapat menerapkan pendekatan proses belajar itu, Korten (1988:247) mengemukakan dua cara, yaitu: “Pertama, dengan membangun sebuah program dan organisasi yang sama sekali baru dari bawah. Kedua, dengan ‘mencangkok’ proses tersebut pada organisasi yang ada, sehingga mempunyai kemampuan baru untuk bekerja di pedesaan”. Tantangan ke depan pembangunan sebagai proses belajar adalah pemaduan antara pelaksanaan kerja, pendidikan dan kelembagaan ke dalam sebuah proses belajar yang koheren. Pengalaman selama ini telah memberi dasar bagi perumusan kerangka kerja dan metode penyusunan pembangunan yang lebih sesuai dengan proses belajar di antara masyarakat desa dan outsider stakeholder, sebab tingkat pengetahuan outsider stakeholder dan kemampuan kelembagaan sangat terbatas untuk memahami tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat.

Muara seluruh proses pembangunan adalah desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun desa beserta masyarakatnya. Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan kata lain, sesungguhnya makna pembangunan negara dan bangsa adalah pembangunan desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. (Riyadi, 2005, p. 15)

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. (Sumodiningrat, 2004, p. 112)

Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for Social Development by Governments). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat

setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya. Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik. (Ndrah, 1990, p. 15)

Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, Bryant & White (1987:389) menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni :

1) Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti.

2) Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi tersebut dianggap menggunakan top down planning yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.

3) Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan

penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu : Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

Konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), Hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang seringkali hanya sebagai batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok, maupun individu

(Usman, 2004, p. 5)

Teori pembangunan adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. (Salim, 2002, p. 264)

1.5.2. Prinsip Pembangunan Desa

Prinsip yang juga dianut dalam pengembangan pembangunan desa:

1.5.2.1 Pemberdayaan

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang sosial budaya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan atau peluang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat.

Pemberdayaan politik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, membangun kelembagaan sosial yang mandiri, membudayaakan ketaatan atas kesempatan yang telah diambil, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.

1.5.2.2 Keterbukaan

Keterbukaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan informasi.

Dengan adanya keterbukaan akan melahirkan kepercayaan, ketertutupan akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan sampai proses evaluasi pembangunan.

1.5.2.3 Keswadayaan

Pembangunan desa, pada dasarnya berasal dari masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, prinsip keswadayaan tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan masyarakat untuk membiayai pembangunan tetapi juga harus dilihat dari sisi pemecahan masalah, pengelolaan dan prakarsa. Dalam prinsip keswadayaan, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, seperti dana desa sifatnya hanya sebagai stimulan dan perangsang yang sewaktu-waktu akan berakhir.

1.5.2.4 Keberlanjutan

Pembangunan di desa jangan seperti orang merencanakan kegiatan pasar malam. Dimana, setelah pasarnya ditutup yang tinggal hanya lapangan kosong. Oleh karena itu, perencanaan desa harus dirancang untuk keberlanjutan.

1.5.2.5 Partisipasi

Partisipasi bukan hanya dipahami seberapa besar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan atau seberapa besar masyarakat bersedia membiayai pelaksanaan program pembangunan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Maksoel (2014) Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman melakukan kajian terhadap Gerakan Desa Membangun yang meliputi bidang pembangunan fisik dan non fisik, serta faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GDM) di Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang hulu Kabupaten Malinau. Penelitian ini berjudul : Implementasi Program Gerakan Desa Membangun Di Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan kegiatan pada bidang sarana fisik yang terdapat didalam Gerdema adalah meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap kegiatan kontruksi. Hasil kegiatan GDM pada masyarakat Desa Long Kebinu mengenai masalah pengembangan SDM khususnya di bidang kerajinan tangan dan biaya pendidikan tentunya kegiatan ini berhasil dan terlaksana dengan baik, karena kegiatan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan perubahan zaman sesuai dengan teori yang berlaku.

Kedua, Helmy Pandawa (2017), penelitian ini berjudul : Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa Dalam Membangun

Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menunjukkan Efektivitas pelaksanaan Alokasi GDM tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Program keberhasilan program Alokasi GDM dan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan berhasil keberhasilan kedua model program tersebut mampu meggerakkan potensi yang ada di Desa Malinau. Tetapi sasaran program belum beralan efektif, pembangunan fisik lebih diprioritaskan dan menjadi program utama dari GDM dan Dana Desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, Efendi (2014), penelitian ini berjudul : Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GDM) Pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh. Penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan program GDM pada bidang perkebunan Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pembuatan percontohan kebun karet, sehingga tidak dalam pengumpulan dan pengarahan kepada masyarakat. Dana Gerakan Desa Membangun merupakan satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan. Alokasi dana GDM di Desa Data Baru untuk pengembangan sektor pertanian khususnya perkebunan karet yaitu sebesar Rp. 286.600.000 dalam tahun anggaran 2012, dengan pembiayaan kegiatan pembukaan lahan perkebunan karet, belanja bibit karet, dan upah tim pelaksana kegiatan GDM. Pemeliharaan perkebunan masyarakat di Desa Data Baru dalam pelaksanaan program GDM khususnya perkebunan, dikelola oleh petani sendiri dari tahap pembukaan lahan sampai pemeliharaan membersihkan kebun karet.

Keempat, Chici Afrianita Sinaga (2017), penelitian ini berjudul :

Efektivitas Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai dalam Pengentasan Desa Tertinggal (Studi Kasus Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini menunjukkan Pada segi fisik dimensi pelayanan dasar Program Gerbang Desa Saburai masih belum efektif dalam mengentaskan desa tertinggal terutama pada Desa Gedung Harapan. Sedangkan pada segi non fisik Program Gerbang Desa Saburai mulai menunjukkan perkembangan melihat dari tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Penyelenggaraan Pemerintahan Program Gerbang Desa Saburai belum mampu mengentaskan desa tertinggal terutama pada Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

Kelima, Versalidiana (2015), penelitian ini berjudul : Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tahap persiapan di Desa Long Nawang dari segi kehadiran dalam kegiatan dan pertemuan telah dilaksanakan dengan cukup baik dikarenakan masih kuatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program Gerdema ini demi meningkatkan kepentingan masyarakat desa Long Nawang dan kegiatan sosialisasi masih belum cukup optimal. penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat tetapi realisasinya tidak mengacu pada Visi dan Misi Desa yang ditetapkan pada dokumen RPJMDes karena pada saat ini belum ada, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme berdasarkan Ketentuan pasal 63 PP Nomor 72

tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam rangka memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan, dan teori yang sudah disusun, maka peneliti menuangkan spesifikasi-spesifikasi sebagai pembatas agar permasalahan tidak melebar dan tetap pada tujuan awal. Spesifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk konsep-konsep atau alternatif-alternatif yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun panduan wawancara.

Desa sebagai salah satu bagian suatu negara memiliki karakteristik yang sama sebagai salah satu lingkungan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Keadaan ini secara nyata memberikan pengaruh besar tata kehidupan desa terutama dalam menciptakan stabilitas diberbagai bidang.

Gerakan Desa Membangun (GDM) yang muncul sebagai gerakan kolektif masyarakat desa di wilayah Banyumas untuk menginisiasi kemandirian desa dengan mengusung pendekatan “desa membangun” sebagai antitesis dari pendekatan “membangun desa” oleh pemerintah. Gerakan ini ingin mewujudkan desa menjadi subyek pembangunan agar lebih mandiri dan bermartabat.

Program GDM dalam pemberdayaan masyarakat dapatmdilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Perencanaan program GDM dalam pembangunan masyarakat, meliputi:

- a. Adanya musyawarah rencana program GDM dalam meningkatkan kemandirian desa serta masyarakat,
 - b. Penyusunan program GDM.
 - c. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi di Desa Melung.
2. Pelaksanaan Program GDM dalam pembangunan masyarakat, meliputi:
- a. Pengelolaan jaringan internet menggunakan akses wifi.
 - b. Pengelolaan website Desa Melung
 - c. Pembuatan website dengan domain desa.id untuk mempertegas identitas desa tersebut
 - d. Pelatihan produksi konten website
 - e. Adanya pelaporan dan pertanggungjawaban dalam program GDM
 - f. Adanya informasi mengenai pelaksanaan program GDM
 - g. Sosialisasi system informasi desa kepada masyarakat desa melalui berbagai media baik pertemuan atau media lainnya.
3. Pengawasan program GDM, meliputi :
- a. Adanya pengawasan oleh pemerintah Desa
 - b. Adanya pengawasan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program GDM dalam menginisiasi kemandirian desa.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif

deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di lapangan. (Nawawi, 1995, p. 64) Berdasarkan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni mengemukakan fakta yang ditemukan. Dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian maka penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta dan memahami permasalahan yang di hadapi pada Gerakan Desa Membangun sebagai gerakan kolektif masyarakat desa menginisiasi kemandirian desa. Sehingga akan di ketahui bagaimana keberlanjutan kebijakan tersebut serta bagaimana proses dan sejarah.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu penggagas GDM dan sampai sekarang aktif dan terus menunjukkan geliatnya sebagai desa yang mengembangkan diri untuk menjadi subyek pembangunan.

1.7.3. Subjek Penelitian

Sumber informan pada penelitian ini dipilih secara non random atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik purposive yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Alasan peneliti menggunakan purposive bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan angapan

bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (representatif) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian.

Subjek atau responden, yaitu orang yang menanggapi pengobatan diberikan kepadanya. Kerlinger (1978) . Subyek penelitian ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. Mikro adalah tingkat terkecil dari subjek penelitian, dan hanya dalam bentuk individu.
2. Meso adalah tingkat subjek penelitian dengan lebih anggota, misalnya, keluarga dan kelompok.
3. Sebuah tingkat makro dengan anggota dari subyek penelitian yang sangat banyak seperti komunitas atau masyarakat luas.

Maka informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Kepala Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas
2. Pendiri Gerakan Desa Membangun Desa Melung
3. Masyarakat setempat Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas
4. Perangkat Desa Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas
5. Ketua dan pengurus serta anggota Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan data yang digunakan adalah kualitatif Menurut Sukmadinata (2005) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Dengan bentuk :

1.7.4.1 Sumber tertulis

Sumber tertulis dapat memberikan aspek yang akan kita teliti misalnya aspek ekonomi, budaya, lain-lain. Dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang tercetak dan tulisan yang masih ditulis tangan atau manuskrip.

1.7.4.2 Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. (Sugiyono, 2011, pp. 329-330)

1.7.4.3 Wawancara

Menurut Berger wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting pada suatu objek). (Kriyantono, 2020, h. 289)

1.7.5. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1.7.5.1 Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber utama. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan berpedoman pada panduan wawancara (*interview guide*) yang telah dirumuskan sebelumnya. Data primer ini antara lain :

- a. Catatan hasil wawancara.
- b. Hasil observasi lapangan.
- c. Data-data mengenai informan.

Adapun informan yang berkompeten dalam penelitian ini adalah kepala Desa Melung, masyarakat, dan fasilitator dari masing-masing Desa Melung diambil perwakilan.

1.7.5.2 Data sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literature yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun buku-

buku atau literature yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memiliki teori pembangunan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Buku Petunjuk Teknis Operasional Gerakan Membangun Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti :

1.7.6.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, yang ditujukan kepada Kepala Desa Melung dan jajarannya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta masyarakat. Yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah Gerakan Desa Membangun di Desa Melung.

1.7.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk sebagai bahan literature yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

1.7.6.3 Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan, waktu dan keadaan tertentu

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data adalah: “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar“. (Moleong, 1993, p. 103)

Menurut Strauss dan Corbin terdapat 3 (tiga) jenis proses analisis data (coding) yaitu Open Coding, Axial Coding, dan Selective Coding. Agar teori yang dibangun berdasarkan data itu tidak salah, ketiga macam coding tersebut harus dilakukan secara simultan dalam penelitian.

1) Open Coding

Merupakan proses merinci, menguji, membandingkan, konseptualisasi, dan melakukan kategorisasi data.

2) Axial Coding

Merupakan suatu perangkat prosedur dimana data dikumpulkan kembali bersama dengan cara baru setelah open coding, dengan membuat kaitan antara kategori-kategori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan landasan berpikir (paradigma) coding yang meliputi kondisi-kondisi, konteks-konteks, aksi strategi-strategi interaksi dan konsekuensi-konsekuensi.

3) Selective Coding

Merupakan proses seleksi kategori inti, menghubungkan secara sistematis ke kategori-kategori lain, melakukan validasi hubungan-hubungan tersebut, dan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang diperlukan lebih lanjut untuk perbaikan dan pengembangan.

1.7.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menguji kualitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2012:241), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapat lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan teori karena menggunakan wawancara dan observasi. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antar satu sumber dengan sumber lainnya sehingga data yang dihasilkan tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja melainkan berbagai sudut pandang. Susan Stainback dalam Sugiyono (2006) menyatakan bahwa, "the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one's understanding of what ever is being investigated". Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. (Susan Stainback, 1988)

Menurut Patton (2015:332), triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.